

**ANALYSIS OF THE DETERMINANTS OF INCOME INEQUALITY IN JAVA
ISLAND PROVINCE 2018-2023**

**ANALISIS DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN PROVINSI
PULAU JAWA 2018-2023**

Pramudya Kusuma Dewa¹, Yuni Prihadi Utomo²

Universitas Muhammadiyah Surakarta^{1,2}

b300210118@student.ums.ac.id¹, yp196@ums.ac.id²

ABSTRACT

Income inequality remains a major concern in Indonesia's economic development, particularly on the island of Java as the national economic center. This study aims to examine the effects of the number of workers, the proportion of agricultural sector workers, government expenditure, and the agricultural sector's GRDP ratio on income inequality in six provinces of Java during the period 2018–2023. A quantitative approach was applied using panel data regression, and the best estimation model was selected through Chow and Hausman tests, with the Random Effect Model (REM) identified as the most appropriate. The results reveal that the proportion of workers in the agricultural sector and government expenditure have a significant and positive influence on income inequality, suggesting that labor distribution and government spending remain uneven and less effective in narrowing the income gap. Meanwhile, the number of workers and agricultural GRDP ratio were found to be statistically insignificant. These findings imply that enhancing labor quality, promoting structural transformation in the agricultural sector, and improving the efficiency of public spending are crucial for achieving more equitable and sustainable income distribution.

Keywords : *Income inequality, labor force, agricultural sector, government expenditure, GRDP*

ABSTRAK

Ketimpangan pendapatan masih menjadi persoalan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya di Pulau Jawa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah pekerja, proporsi pekerja sektor pertanian, pengeluaran pemerintah, dan rasio PDRB sektor pertanian terhadap ketimpangan pendapatan di enam provinsi Pulau Jawa selama periode 2018–2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel, serta pemilihan model terbaik dilakukan melalui uji Chow dan Hausman yang menetapkan Random Effect Model (REM) sebagai model estimasi yang paling sesuai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi pekerja di sektor pertanian dan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, yang mengindikasikan bahwa distribusi tenaga kerja dan alokasi belanja pemerintah belum merata dan belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi ketimpangan. Sementara itu, jumlah pekerja dan rasio PDRB pertanian tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini memberikan implikasi bahwa peningkatan kualitas tenaga kerja, transformasi struktural di sektor pertanian, serta efisiensi dalam alokasi pengeluaran pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan distribusi pendapatan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Ketimpangan Pendapatan, Tenaga Kerja, Sektor Pertanian, Pengeluaran Pemerintah, PDRB

PENDAHULUAN

Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapatan yang diterima masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendapatan nasional. Ratnasari, (2017) Ketimpangan pendapatan menjadi masalah ekonomi yang mendesak di Pulau Jawa, kawasan yang menjadi pusat ekonomi Indonesia. Sebagai kontributor utama terhadap PDB nasional, Pulau Jawa memiliki

peran strategis dalam perekonomian negara. Namun, pesatnya pertumbuhan ekonomi tidak selalu berdampak pada pemerataan pendapatan. Ketimpangan yang mencolok masih terlihat, di mana sebagian besar kekayaan terpusat di beberapa wilayah, sementara sebagian masyarakat lainnya hidup dalam keterbatasan. Ketimpangan pendapatan antar pulau di Indonesia rata rata masuk dalam kategori jenis ketimpangan

sedang yang diukur dari Rasio Gini (Farhan & Sugianto, 2022).

Gini Ratio merupakan ukuran ketimpangan pendapatan yang digunakan, apabila nilai dari Gini Ratio mencapai angka 1 menandakan bahwa ketimpangan di wilayah tersebut tinggi dan sebaliknya apabila suatu wilayah memiliki nilai Gini Ratio mendekati 0 maka ketimpangan tersebut kecil (BPS, 2023b). Pada Negara Indonesia, yang bertugas menghitung ketimpangan pengeluaran yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yaitu Badan Pusat Statistik (BPS).

Berdasarkan data BPS pada maret 2023, Indeks Gini di Indonesia sebesar 0,388, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Indeks Gini sebesar 0,245 menjadi provinsi dengan tingkat ketimpangan pendapatan terendah, sedangkan DIY dengan Indeks Gini sebesar 0,449 menjadi provinsi dengan ketimpangan terbesar di Indonesia berdasarkan data tersebut ketimpangan pendapatan masih terbilang rendah hingga sedang.

Secara umum, tren ketimpangan pendapatan di Indonesia dalam 10 tahun terakhir menunjukkan penurunan. Namun, tingkat penurunan dan kondisi yang spesifik di setiap provinsi berbeda. Berdasarkan data dalam publikasi (BPS, 2023a), ketimpangan pendapatan di enam provinsi di Pulau Jawa menunjukkan tren yang bervariasi selama periode 2014-2023, di provinsi Banten pada tahun 2014 Indeks Gini sebesar 0,424 mengalami penurunan pada tahun 2023 Indeks Gini menjadi 0,368, DKI Jakarta pada tahun 2014 Indeks Gini sebesar 0,436 mengalami penurunan pada tahun 2023 Indeks Gini menjadi 0,431, Jawa Barat pada tahun 2014 Indeks Gini sebesar 0,398 mengalami kenaikan pada tahun 2023 Indeks Gini menjadi 0,425, Jawa Tengah pada tahun 2014 Indeks Gini sebesar

0,388 mengalami penurunan pada tahun 2023 Indeks Gini menjadi 0,369, Jawa Timur pada tahun 2014 Indeks Gini sebesar 0,403 mengalami penurunan pada tahun 2023 Indeks Gini menjadi 0,387, DIY pada tahun 2014 Indeks Gini sebesar 0,435 mengalami kenaikan pada tahun 2023 Indeks Gini menjadi 0,449. Gambar 1 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan Provinsi Pulau Jawa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 mengalami ketidakstabilan (naik turun).



Gambar 1. Indeks Gini Pulau Jawa Tahun 2018-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Dari Grafik 1 menunjukkan Gini Ratio di 6 Provinsi selama periode 2018-2023. Dari 6 provinsi tersebut terdapat dua provinsi pulau Jawa yang memiliki Gini Ratio yang tinggi, yaitu DIY dengan angka 0,449 dan DKI Jakarta dengan angka 0,43. Dua provinsi dengan Gini Ratio terendah yaitu, Banten dengan Gini Ratio sebesar 0,368, dan Jawa Tengah dengan Gini Ratio 0,369. Perbedaan tingkat Gini Ratio di setiap provinsi menunjukkan seberapa besar ketimpangan pendapatan setiap provinsi dan masalah yang perlu dilakukan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan.

Hipotesis "U-terbalik" yang dikemukakan oleh Simon Kuznets menjelaskan bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi, ketimpangan pendapatan meningkat akibat peralihan tenaga kerja dari sektor pertanian ke

industri. Hanya sebagian kecil tenaga kerja yang dapat langsung beradaptasi dan memperoleh manfaat dari industrialisasi, sehingga kesenjangan ekonomi semakin lebar (Vionita & Artha, 2024). Namun, seiring pertumbuhan ekonomi, semakin banyak tenaga kerja yang terserap di sektor industri dan jasa, meningkatkan distribusi pendapatan dan menurunkan ketimpangan (Anugra et al., 2019). Kuznets berpendapat bahwa pergeseran tenaga kerja ke sektor berproduktivitas tinggi menjadi faktor utama dalam perubahan ketimpangan pendapatan.

Teori Ekonomi Neo-Klasik menyatakan bahwa pendapatan individu ditentukan oleh produktivitas marjinal tenaga kerja. Semakin tinggi produktivitas seseorang, semakin besar pula pendapatan yang diperoleh. Oleh karena itu, produktivitas menjadi faktor utama dalam menentukan distribusi pendapatan. Namun, perbedaan produktivitas antar pekerja dapat menimbulkan ketimpangan. Pekerja dengan produktivitas tinggi cenderung menerima upah lebih besar, sementara biaya tenaga kerja yang meningkat dapat mengurangi permintaan terhadap tenaga kerja berproduktivitas rendah, sehingga memperburuk ketimpangan pendapatan. Caesarisma & Hamrullah (2023). Untuk mengatasinya, teori ini menekankan pentingnya investasi dalam modal manusia, seperti pendidikan dan pelatihan, guna meningkatkan produktivitas secara merata. Selain itu, mobilitas tenaga kerja dan persaingan yang adil di pasar tenaga kerja juga diperlukan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan (Hidayat & Rahayu, 2018).

Smith dan Todaro mendefinisikan ketimpangan pendapatan sebagai "sejauh mana individu dalam suatu komunitas memiliki tingkat akses yang berbeda, atau partisipasi dalam

kelompok pendapatan nasional". Karena orang kaya memiliki kecenderungan yang lebih kuat untuk menabung daripada orang miskin, distribusi pendapatan yang tidak merata mengarah kepada tingkat tabungan agregat yang tinggi serta menghasilkan lebih banyak investasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik (Astuti & Hukom, 2023).

Menurut pandangan Karl Marx Dalam Daniel & Bahari (2024) ketimpangan pendapatan sebagai konsekuensi inheren dari sistem kapitalis yang didasarkan pada eksploitasi tenaga kerja oleh kelas pemilik modal (borjuis). Ketimpangan pendapatan terjadi karena pemilik modal terus mengambil nilai lebih (surplus value) dari pekerja, yang menciptakan akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang, sementara pekerja tetap miskin. Dalam Yasmin & Syofyan (2024) Karl Mark berpendapat, kenaikan upah tenaga kerja akan menyebabkan kesenjangan ekonomi dan pengangguran karena permintaan tenaga kerja turun dan risiko modal semakin meningkat.

Menurut John Rawls Kebebasan dan keadilan menjadi prinsip yang dapat mengatasi masalah ketimpangan pendapatan. Kebebasan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu John Rawls menenpatkan kebebasan sebagai prinsip pertama dari keadilan. Prinsip kedua perbedaan, Pertama "setiap orang harus mempunyai hak yang sama atas sistem kebebasan dasar yang sama yang paling luas sesuai dengan sistem kebebasan serupa bagi semua". Kedua ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga ketidaksamaan itu menguntungkan mereka yang paling kurang beruntung dan sesuai dengan tugas dan kedudukan yang terbuka bagi semua di bawah kondisi persamaan kesempatan yang sama (Fattah, 2013).

Teori ketidaksetaraan struktural, teori ini berargumen bahwa ketimpangan pendapatan tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor sosial dan politik. Diskriminasi berdasarkan ras, gender, atau kelas sosial dapat menghalangi akses individu terhadap pendidikan dan pekerjaan yang baik, sehingga memperburuk ketimpangan pendapatan (Wibowo, 2016).

Menurut Kuncoro dalam (Rinjani, 2018) peningkatan pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan berkurangnya ketimpangan distribusi pendapatan merupakan representasi dari keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara, dan pada dasarnya pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung akan tetap berpengaruh terhadap ketimpangan daerah. Ketimpangan daerah dalam hal ini merupakan ketimpangan perkembangan ekonomi antar berbagai daerah pada suatu wilayah yang akan menyebabkan pula ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah. Dalam (Juliana & Soelistyo, 2019) Kuncoro menyatakan ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat. Perbedaan ini yang membuat tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda-beda, sehingga menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah dan besarnya pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan yaitu, Jumlah Pekerja, Pengeluaran Pemerintah, Proporsi Pekerja Sektor Pertanian, dan Rasio PDRB pertanian di provinsi pulau Jawa periode 2018-2023.

TINJAUAN PUSTAKA

Di Indonesia selama periode 2004 hingga 2020 dengan analisis regresi *Ordinary Least Square* (OLS) ditemukan bahwa variabel pengeluaran pemerintah dan pembangunan manusia berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan dengan koefisien regresi sebesar 0,000025 dan -0,0071682 dengan signifikansi empirik (ρ) t sebesar 0.000 ($< 0,05$) dan 0,029 ($< 0,05$) (Wulandari & Rahmawati, 2022).

Farhan & Sugianto (2022), menggunakan analisis regresi data panel dengan model estimasi terpilih *Fixed Effect Model* (FEM) dengan data dari 6 provinsi di pulau Jawa dari tahun 2014-2020, menemukan bahwa variabel tingkat kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan dengan koefisien regresi sebesar -0.011333 dan -0.014811 dengan signifikansi empirik (ρ) t sebesar 0,0286 ($< 0,05$) dan 0,0001 ($< 0,05$).

Di provinsi pulau Jawa selama periode 2012 hingga 2021 menggunakan analisis regresi data panel dengan model estimasi terpilih *Fixed Effect Model* (FEM) menemukan bahwa variabel (IPM) dan variabel (TPT) berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dengan koefisien regresi sebesar -0,002742 dan 0,006166 signifikansi empirik (ρ) t sebesar 0,088 ($> 0,05$) dan 0,02 ($< 0,05$) (Yoertiara, 2022).

Janah, (2022), Menggunakan analisis regresi data panel dengan model estimasi terpilih *Fixed Effect Model* (FEM) dengan data tahun 2019-2021 di Indonesia menemukan bahwa IPM, PMA, dan PDRBPKP berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan dengan koefisien regresi sebesar 0,000627, 7,50E-07, dan -2,19E-07 serta signifikansi empirik (ρ) t sebesar 0,67 ($> 0,05$), 0,33 ($> 0,05$), dan 0,43 ($< 0,05$).

Di Indonesia selama periode 2015 hingga 2019 menggunakan analisis regresi *Ordinary Least Square* (OLS) menemukan bahwa variabel PMDN dan variabel PAD berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan dengan koefisien regresi sebesar 0,00313, 0,0184, dengan signifikansi empirik (ρ) t sebesar 0,0027 ($< 0,05$), dan 0,0346 ($> 0,05$) (Rifaldo & Rejekiingsih, 2024)

Hindun et al., (2019), Menggunakan analisis regresi data panel dengan model estimasi terpilih *Random Effect Model* (REM) dengan data periode 2011 hingga 2018 di Indonesia menemukan bahwa variabel pendidikan dan variabel kemiskinan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan dengan koefisien regresi sebesar -0.0211088 dan 0.028837 dengan signifikansi empirik (ρ) t sebesar 0.041 (< 0.05), dan 0.001 (< 0.05).

Di Indonesia selama periode 1997 hingga 2021 dengan analisis regresi *Ordinary Least Square* ditemukan bahwa penanaman modal asing, Indeks persepsi korupsi, kemiskinan, pengangguran, dan upah minimum provinsi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan dengan koefisien regresi sebesar 5.21E-06, 1.232178, 4.59E-06, 1.59E-05, dan -9.58E-08 dengan signifikansi empirik (ρ) t sebesar 0.0000 ($< 0,05$), 0.0000 ($< 0,05$), 0.0001 ($< 0,05$), 0.0000 ($< 0,05$), dan 0.0000 ($< 0,05$). (Karimi et al., 2023)

Sari, (2021), Menggunakan analisis regresi data panel dengan model estimasi terpilih *Common Effect Model* dengan tahun 2014 hingga 2019 di Yogyakarta menemukan bahwa PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan dengan koefisien regresi sebesar -2.07E-09, dan 3.50E-08 dengan signifikansi empirik (ρ) t sebesar 0,0573 ($< 0,10$) dan 0,0081 ($< 0,01$).

Di 10 Provinsi Pulau Sumatra selama periode 2017–2021 dengan

analisis regresi data panel ditemukan bahwa variabel kepadatan penduduk memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan dengan koefisien regresi sebesar 0.801031, selain itu, PDRB dan tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, masing-masing dengan koefisien -0.018439 dan -0.020611, sedangkan jumlah penduduk miskin tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (Aida et al., 2023).

Di Indonesia selama periode 2018-2022, menggunakan analisis regresi data panel dengan model estimasi terpilih *Fixed Effect Model* (FEM). ditemukan variabel rasio PDRB sektor industri dan upah minimum provinsi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, dengan koefisien regresi sebesar -0,00249 dan -1.67E-08 dengan signifikansi empirik (ρ) t sebesar 0,0164. ($< 0,01$) dan 0,0000 ($< 0,01$) (Amalia & Utomo, 2024).

Astuti & Hukom, (2023) Menggunakan analisis regresi data panel dengan model estimasi terpilih *Fixed Effect Model* (FEM) dengan tahun 2018 hingga 2022 di Kalimantan Tengah menemukan bahwa variabel tenaga kerja berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dengan koefisien regresi sebesar 3,596987, dengan signifikansi empirik (ρ) t sebesar 0,0007 ($< 0,05$).

Di Provinsi Jawa Barat selama periode 2018 hingga 2022, menggunakan metode analisis data panel dengan model estimasi terpilih *Fixed Effect Model* (FEM). Ditemukan bahwa variabel Indeks pembangunan manusia, dana alokasi umum, dan angkatan kerja berpengaruh Ketimpangan Pendapatan dengan koefisien regresi 0.013624, -0.101997, dan -0.196643, dengan

signifikansi empirik (ρ) t sebesar 0.0352 ($< 0,05$), 0.0570 ($< 0,10$), dan 0,0046 ($< 0,05$) (Fatonah & Sebayang, 2024).

Di 33 Provinsi Indonesia selama periode 2018 hingga 2023 menggunakan analisis regresi data panel dengan model estimasi terpilih *Random Effect Model* (REM) ditemukan bahwa variabel Inklusi Keuangan dan Pembiayaan Bank Syariah berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan dengan koefisien regresi sebesar 0.010611 dan -0.018986, dengan signifikansi empirik (ρ) t sebesar 0,982 ($< 0,1$), dan 0,0026 ($< 0,1$) (Asih et al., 2022).

Firdaus & Hasmarini, (2023) Menggunakan analisis regresi data panel dengan model estimasi terpilih *Random Effect Model* (REM) dengan tahun 2015 hingga 2022 di Provinsi Bali menemukan variabel jumlah penduduk, upah minimum kabupaten, Indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan dengan koefisien regresi sebesar -0.046643, -0.085393 0.003251, dan 0.007721, dengan signifikansi empirik (ρ) t sebesar 0,00222 ($< 0,01$), 0,0003 ($< 0,01$), 0,0231 ($< 0,05$), dan 0,0718 ($< 0,1$).

Di 5 provinsi Sumatera Selatan selama periode 2010 hingga 2019 menggunakan analisis regresi data panel dengan model estimasi terpilih *Fixed Effect Model* (FEM) ditemukan bahwa variabel IPM, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dengan koefisien regresi sebesar 0.000694, -0.039211, dan 0.000801 dengan signifikansi empirik (ρ) t sebesar 0,8020 ($> 0,05$), 0,0197 ($< 0,05$), dan 0,8208 ($> 0,05$) (Ersad et al., 2022).

METODE PENELITIAN

yang Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan model

ekonometrik sebagai berikut:

$$IG_{it} = \beta_0 + \beta_1 EMP_{it} + \beta_2 PTK_{it} + \beta_3 GE_{it} + \beta_4 PDRBP_{it} + e_{it}$$

di mana:

- IG : Indeks Gini (Persen)
- EMP : Jumlah Pekerja (Ribuan)
- PTK : Proporsi Pekerja di Sektor Pertanian (Persen)
- GE : Pengeluaran Pemerintah (Milyar Rupiah)
- PDRBP : Rasio PDRB sektor Pertanian (Persen)
- β_0 : Konstanta
- $\beta_1 \dots \beta_6$: Koefisien Regresi
- Log : Operasi Logaritma
- μ : Variabel Pengganggu (eror term)
- i : Provinsi ke i
- t : Tahun ke t

Model ekonometrik di atas merupakan kombinasi dari beberapa model. Variabel pengeluaran pemerintah diambil dari model Wulandari & Rahmawati, (2022) variabel tenaga kerja diambil dari model Astuti & Hukom, (2023) dan untuk memperkaya variabel penelitian maka ditambahkan variabel proporsi tenaga kerja di sektor pertanian, dan rasio PDRB sektor pertanian. Jumlah Pekerja, dan pekerja sektor pertanian diduga memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan Proporsi PDRB Sektor Pertanian dan Pengeluaran pemerintah diduga memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan.

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data panel yaitu kombinasi dari data *time series* dan *cross section*. Data *time series* dari tahun 2018-2023, sedangkan data *cross section* yang digunakan adalah 6 provinsi di Pulau Jawa. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Tahap estimasi analisis regresi data panel meliputi estimasi parameter model

ekonometrik dengan pendekatan *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM); pemilihan model terestimasi terbaik dengan uji Chow dan uji Hausman dan uji Lagrange Multiplier jika diperlukan; uji kebaikan model pada model terestimasi terpilih; dan uji validitas pengaruh variabel independen pada model terestimasi terpilih.

4. HASIL PENELITIAN

Hasil estimasi model ekonometrik di muka dengan pendekatan *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) beserta hasil uji pemilihan modelnya terangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Estimasi Model Ekonometrik Regresi Data Panel

Variabel	Koefisien Regresi		
	PLS	FEM	REM
<i>C</i>	0,655284	-0,312554	0,405308
<i>logEMP</i>	-0,052067	0,022289	-0,022294
<i>PTK</i>	0,001093	0,001186	0,001247
<i>logGE</i>	0,044788	0,024274	0,024731
<i>PDRBP</i>	-0,002068	-0,002475	-0,004502
R^2	0,339784	0,927592	0,282925
<i>Adjusted R²</i>	0,254595	0,902528	0,190400
Statistik <i>F</i>	3,988579	37,00849	3,057802
Prob. Statistik <i>F</i>	0,010050	0,000000	0,031079
Uji Pemilihan Model			
(1) Chow			
Cross-section $F(5,26) = 42,2136$; Prob. $F(5,26) = 0,0000$			
(2) Hausman			
Cross section random $\chi^2(4) = 1,4972$; Prob. $\chi^2(4) = 0,8271$			

Sumber: BPS, diolah.

Dari Tabel 1, hasil uji Chow menunjukkan nilai p (p-value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik *F* sebesar 0,0000 (<0,01), dari hasil tersebut maka model terestimasi yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Sedangkan hasil dari uji Hausman menunjukkan nilai p (p-value), probabilitas atau signifikansi empirik

statistik χ^2 sebesar 0,8271 (> 0,10) yang berarti model terestimasi yang terpilih adalah *Random Effect Model* (REM).

Dari uji Chow dan uji Hausman di muka, model *Random Effect Model* (REM) terpilih sebagai model terestimasi terbaik. Hasil estimasi lengkap model *Random Effect Model* (REM) terlihat pada Tabel 2 dan 3.

Tabel 2. Model Estimasi *Random Effect Model* (REM)

$$\widehat{IG}_{it} = 0,405308 - 0,022294 \log EMP_{it} + 0,001247 PTK_{it} + 0,024731 \log GE_{it}$$

(0,3313)	(0,0170)*	(0,0530)**
- 0,004502PDRBP _{it}		
(0,1848)		

$R^2 = 0,36704$; $DW = 1,2211$; $F = 26,2886$; Prob. $F = 0,0000$

Sumber: BPS, diolah. **Keterangan:** *Signifikan pada $\alpha = 0,01$; **Signifikan pada $\alpha = 0,05$; *** Signifikan pada $\alpha = 0,10$; Angka dalam kurung adalah probabilitas nilai statistik t.

Tabel 3. Efek dan Konstanta Wilayah

No	Provinsi	Effect	Konstanta
1	Banten	-0,038019	0,367289
2	DKI Jakarta	0,009241	0,414549
3	Jabar	0,013793	0,419101
4	Jateng	-0,007129	0,398179
5	Jatim	-0,012833	0,392475
6	Yogyakarta	0,034947	0,440255

Sumber: BPS, diolah.

Dari Tabel 2 terlihat model terestimasi REM eksis dengan probabilitas atau signifikansi empirik statistik F bernilai 0,0000 ($< 0,01$), dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,36704; yang menunjukkan model terestimasi REM memiliki daya ramal sedang, Variabel independen Proporsi Pekerja di Sektor Pertanian (PTK), dan Pengeluaran Pemerintah (GE) memiliki pengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan (IG) dengan probabilitas atau signifikansi empirik statistik t masing-masing sebesar 0,0170 ($< 0,05$) dan 0,0530 ($< 0,1$).

Variabel Proporsi Pekerja di Sektor Pertanian memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,001247, dengan pola hubungan linier-linier. Artinya, apabila Proporsi Pekerja di Sektor Pertanian naik 1 persen maka Ketimpangan Pendapatan naik sebesar 0,001247. Sebaliknya, apabila Proporsi Pekerja di Sektor Pertanian turun 1 persen, maka Ketimpangan Pendapatan akan turun sebesar 0,001247.

Variabel Pengeluaran Pemerintah memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,024731, dengan pola hubungan linier-logaritma. Artinya, apabila Pengeluaran Pemerintah naik 1 persen, maka Ketimpangan Pendapatan akan naik sebesar $0,024731 : 100 = 0,00024731$. Sebaliknya apabila Pengeluaran Pemerintah turun 1 persen, maka Ketimpangan Pendapatan akan turun sebesar 0,00024731.

Nilai konstanta masing-masing Provinsi dapat dilihat pada Tabel 3. Nilai konstanta tertinggi dimiliki oleh Provinsi Yogyakarta, yaitu sebesar 0,440255. Artinya, terkait dengan pengaruh variabel Proporsi Pekerja di Sektor Pertanian, dan Pengeluaran Pemerintah di Yogyakarta cenderung memiliki Ketimpangan Pendapatan lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Setelah provinsi Yogyakarta, dua provinsi dengan konstanta tertinggi adalah Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Nilai konstanta terendah dimiliki oleh Provinsi Banten, yaitu sebesar 0,367289. Artinya, terkait dengan

pengaruh variabel Proporsi Pekerja di Sektor Pertanian, dan Pengeluaran Pemerintah di Banten cenderung memiliki Ketimpangan Pendapatan cukup rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Setelah provinsi Banten, dua provinsi dengan konstanta terendah adalah Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Perbedaan konstanta antar wilayah sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3 mencerminkan adanya efek individual yang bersifat spesifik wilayah dalam model Random Effect Model (REM). Nilai konstanta yang bervariasi menunjukkan bahwa setiap provinsi memiliki karakteristik unik yang tidak sepenuhnya dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model, seperti Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Pekerja, dan lainnya. Karakteristik ini mencakup faktor-faktor tak terukur seperti kebijakan fiskal, program sosial, ketidakmerataan pembangunan daerah serta kondisi geografis masing-masing wilayah.

Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Pulau Jawa selama periode tahun 2018-2023 dipengaruhi oleh variabel Pekerja di Sektor Pertanian (*PTK*) dan Pengeluaran Pemerintah (*GE*).

Interpretasi Ekonomi

Variabel Jumlah Pekerja tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan, menunjukkan bahwa perubahan dalam jumlah orang yang bekerja di suatu wilayah tidak secara otomatis menyebabkan perubahan pada tingkat ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut. Dengan kata lain, baik peningkatan maupun penurunan jumlah pekerja tidak secara langsung memperkecil atau memperbesar Ketimpangan Pendapatan pada wilayah tersebut. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifaldo

& Rejekiningsih, (2024) berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa variabel Tenaga Kerja tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia tahun 2015 hingga 2019. Hal ini terjadi karena kenaikan produktivitas tenaga kerja yang tidak merata antar berbagai daerah akan menyebabkan adanya daerah yang relatif maju dan daerah yang relatif tidak maju produktivitas tenaga kerjanya. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Silalahi et al., (2024) berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa variabel Jumlah Pekerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan distribusi Pendapatan di Indonesia tahun 2014 hingga 2023.

Variabel Pekerja di Sektor Pertanian memiliki pengaruh positif terhadap Ketimpangan Pendapatan. Peningkatan jumlah Pekerja di Sektor Pertanian cenderung meningkatkan Ketimpangan Pendapatan, hal ini terjadi karena rendahnya produktivitas dan pendapatan di sektor pertanian dibandingkan sektor lain, sehingga distribusi pendapatan nasional semakin tidak merata ketika banyak tenaga kerja bertahan di sektor pertanian tradisional. Untuk mengurangi ketimpangan, diperlukan transformasi struktural melalui peningkatan produktivitas pertanian, diversifikasi ekonomi pedesaan, dan perbaikan akses terhadap pendidikan, teknologi, serta modal bagi pekerja pertanian. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akbar et al., (2021) di Indonesia periode 2011 hingga 2019. Berdasarkan hasil analisis regresi, sektor pertanian berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan Pendapatan hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase pekerja sektor pertanian maka Ketimpangan Pendapatan akan semakin kecil.

Variabel Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif, menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah belum efektif menurunkan Ketimpangan Pendapatan. Hal ini memperlihatkan bahwa Pengeluaran Pemerintah dapat memperbesar tingkat Ketimpangan Pendapatan, semakin besar Pengeluaran Pemerintah, Ketimpangan distribusi Pendapatan justru cenderung meningkat. Dengan kata lain, alih-alih memperkecil Ketimpangan Pendapatan, Pengeluaran pemerintah justru memperlebar ketimpangan distribusi Pendapatan antar kelompok masyarakat. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari & Rahmawati, (2022) berdasarkan hasil regresi, menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan pada pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan Indonesia tahun 2004-2020. Hubungan positif antara Pengeluaran Pemerintah dan Ketimpangan Pendapatan menunjukkan Pengeluaran Pemerintah yang semakin meningkat dapat meningkatkan Ketimpangan Pendapatan antar kelompok masyarakat. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi, (2023) hasil analisis regresi di Indonesia tahun 2015 hingga 2019 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.

Variabel PDRB di Sektor Pertanian tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan nilai produksi atau output ekonomi di sektor pertanian belum mampu secara langsung mengubah distribusi pendapatan secara signifikan di masyarakat. Meskipun PDRB Sektor Pertanian meningkat, hal ini tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan petani secara optimal. Peningkatan produksi bisa jadi lebih banyak

dinikmati oleh pemilik modal atau pelaku usaha besar di sektor pertanian, sementara petani kecil atau buruh tani belum merasakan manfaat yang signifikan. Akibatnya, Ketimpangan Pendapatan tetap tidak berubah secara signifikan meskipun PDRB pertanian naik. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah et al., (2022) berdasarkan hasil regresi, menunjukkan bahwa PDRB sektor pertanian tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan provinsi-provinsi Pulau Sumatera 2015 hingga 2019. Fakta tidak signifikannya pengaruh PDRB pertanian terhadap ketimpangan distribusi pendapatan menunjukkan bahwa peningkatan produksi sektor pertanian di provinsi-provinsi Pulau Sumatera belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara optimal. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri & Iryani, (2023) berdasarkan hasil pengujian regresi, ditemukan bahwa PDRB di Sektor Pertanian berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2007 hingga 2022.

PENUTUP

Kesimpulan

Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Pulau Jawa selama tahun 2018-2023 dipengaruhi oleh Pekerja di Sektor Pertanian dan Pengeluaran Pemerintah. Pekerja di Sektor Pertanian memiliki peran penting dalam mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Secara umum, sektor pertanian yang menyerap banyak tenaga kerja dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan, terutama di daerah pedesaan. Namun, modernisasi dan penggunaan teknologi canggih di sektor pertanian dapat menurunkan penyerapan tenaga kerja,

sehingga berpotensi meningkatkan ketimpangan. Oleh karena itu, Pengembangan sektor pertanian sebaiknya mengutamakan modernisasi untuk meningkatkan produktivitas, namun tetap menjaga penyerapan tenaga kerja. Seperti menerapkan teknologi yang sesuai dan tepat guna, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru di bidang pertanian. Selain itu, pemberdayaan petani kecil melalui kemudahan akses terhadap modal, pasar, dan teknologi yang relevan dapat meningkatkan pendapatan mereka sekaligus membantu mengurangi kesenjangan pendapatan.

Pengeluaran Pemerintah belum efektif menurunkan Ketimpangan Pendapatan. Hal ini memperlihatkan bahwa Pengeluaran Pemerintah ternyata dapat memperbesar tingkat Ketimpangan Pendapatan, semakin besar Pengeluaran Pemerintah, Ketimpangan distribusi Pendapatan justru cenderung meningkat. Dengan kata lain, alih-alih memperkecil Ketimpangan Pendapatan, Pengeluaran Pemerintah justru memperlebar ketimpangan antar kelompok masyarakat. Oleh karena itu Pengeluaran pemerintah perlu dipastikan tepat sasaran dengan melakukan evaluasi ulang terhadap alokasi anggaran, agar benar-benar mendukung kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan diarahkan pada program yang memberikan manfaat luas. Selain itu, upaya penguatan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan sektor informal, harus diperkuat guna menciptakan lebih banyak kesempatan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel-variabel baru yang lebih relevan. Selain itu,

penelitian dengan topik ini dapat dilakukan di wilayah yang berbeda, sehingga bisa didapatkan kesimpulan yang lebih kuat terkait faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aida, N., Abilio, M. K., & Marselina, M. (2023). *Determinants Of Income Inequality In 10 Provinces On The Island Of Sumatra For The Period 2017 – 2021*. 3. <https://doi.org/10.4108/eai.13-9-2023.2341218>
- Akbar, U. U., Sari, Y. P., Yeni, I., Adry, M. R., Putri, D. Z., Ekonomi, F., & Padang, U. N. (2021). Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia (Studi: Data Panel Pertumbuhan Sektor Pertanian). *Education and Development*, 9(4), 421–425.
- Amalia, A. M., & Utomo, Y. P. (2024). *Dampak Perubahan Struktur Ekonomi dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia*. 6(2), 616–628.
- Anugra, R., Marwa, T., & Imelda, I. (2019). Analisis hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1), 31–40. <https://doi.org/10.29259/jep.v14i1.8773>
- Asih, R. D. T., Devi, A., & Kartika, T. (2022). Pengaruh Inklusi Keuangan dan Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Ketimpangan Pendapatan Nasional dalam Program SDGs: Sustainable Development Goals. *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal*, 1(1), 39–56. <https://doi.org/10.56672/assyirkah>

- .v3i3.338
- Astuti, D., & Hukom, A. (2023). Analisis Pengaruh PDRB, IPM Dan Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Kalimantan Tengah. *Optimal Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 3(2), 73–84. <https://doi.org/10.55606/optimal.v3i2.1395>
- BPS. (2023a). *Indeks Gini Menurut Provinsi Pulau Jawa, 2014-2023*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTgjMg==/gini-rasio--september-2024.html>
- BPS. (2023b). *No Title*. <https://blorakab.bps.go.id/id/news/2024/02/06/293/apa-itu-gini-ratio-.html>
- Caesarisma, E., & Hamrullah. (2023). Jurnal Ekonomika dan Dinamika Sosial Analisis Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2017-2021. *Jurnal Ekonomika Dan Dinamika Sosial*, 2(2), 81–98.
- Daniel, D., & Bahari, Y. (2024). Masalah Sosial Kemiskinan di Indonesia: Suatu Pandangan Teoritis Karl Marx. *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*, 9(1), 1–12. <https://doi.org/10.25273/gulawentah.v9i1.19432>
- Ersad, M. E., Amir, A., & Zulgani, Z. (2022). Dampak IPM, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(2), 425–438. <https://doi.org/10.22437/jpe.v17i2.15614>
- Farhan, M., & Sugianto, S. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Jawa. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(4), 243–258. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i4.29>
- Fatonah, A. A., & Sebayang, A. F. (2024). *Indeks Pembangunan Manusia , Dana Alokasi Umum , dan Angkatan Kerja terhadap Ketimpangan Pendapatan*. 87–96.
- Fattah, D. (2013). Teori Keadilan Menurut John Rawl. *Jurnal TAPIs*, 9(2), hlm 35.
- Firdaus, A., & Hasmarini, M. I. (2023). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum Kabupaten, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Kab/Kota di Provinsi Bali Pada Tahun 2015-2022. *Primanomics : Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 21(3 SE-Articles), 116–123. <https://doi.org/10.31253/pe.v21i3.2128>
- Firmansyah, U., Junaidi, J., & Achmad, E. (2022). Pengaruh nilai tukar petani, indeks pembangunan manusia dan PDRB sektor pertanian terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Provinsi di Wilayah Sumatera. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 11(1), 9–14. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v11i1.16777>
- Hidayat, M., & Rahayu, S. (2018). Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau: Pendekatan Regresi Kuadratik. *Jurnal Ekonomi Sakti (JES)*, 7(1), 13–21. <http://jes.stiesak.ac.id/index.php/103044/article/view/156>
- Hindun, H., Soejoto, A., & Hariyati, H. (2019). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan

- terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 8(3), 250.
<https://doi.org/10.26418/jebik.v8i3.34721>
- Janah, M. (2022). Analisis Pengaruh Tingkat Pdrb Perkapita, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Penanaman Modal Asing Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia Periode Tahun 2019-2021. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 23–43.
<https://doi.org/10.58192/profit.v1i4.183>
- Juliana, R., & Soelistyo, A. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Pad, Ipm, Dan Umk Terhadap Ketimpangan Di Provinsi Banten. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 3(2), 293–300.
<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jie/article/view/8232>
- Karimi, K., Mulyani, P., Murialti, N., & Tibrani, T. (2023). Pengaruh Penanaman Modal Asing, Indeks Persepsi Korupsi, Kemiskinan, Pengangguran dan Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 13(1), 107–116.
<https://doi.org/10.37859/jae.v13i1.4775>
- Putri, M., & Iryani, N. (2023). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan*. 6(2), 98–109.
- Ratnasari, L. (2017). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 5(2), 32–36.
<https://doi.org/10.22437/pdpd.v5i2.4100>
- Rifaldo, M. D., & Rejekiningsih, T. W. (2024). *Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia Tahun 2015-2019*. 13(2), 27–40.
- Rinjani, M. F. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia Tahun 2010-2016. *Skripsi*, 2006, 2.
<http://repository.umy.ac.id>
- Sari, R. N. I. (2021). Analisis Pengaruh Pdrb, Jumlah Penduduk, Dan Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2014-2019. (*Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta*).
- Silalahi, S. M., Sitorus, H., Hasanah, I., Tobing, P. Y., Medan, U. N., Medan, K., Utara, P. S., & Pendapatan, D. (2024). *Pengaruh Jumlah Penduduk yang Bekerja dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan*. 1(2), 557–568.
- Vionita, Y., & Artha, D. P. (2024). *Analisis Faktor-Faktor Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa Sumber : Badan Pusat Statistik*.
- Wahyudi, W. (2023). Pengeluaran Pemerintah Provinsi Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Sebatik*, 27(2), 708–715.
<https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i2.2369>
- Wibowo, T. (2016). Ketimpangan Pendapatan dan Middle Income Trap Income Inequality and Middle Income Trap. *Kajian Ekonomi Keuangan*, 20(2), 112–132.

<http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal>

- Wulandari, D. F., & Rahmawati, F. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pembangunan Manusia, dan Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pendapatan Indonesia. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(3), 583–590. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i3.1216>
- Yasmin, R., & Syofyan, S. (2024). *Determinasi Ketimpangan Pendapatan Wilayah Perkotaan Dan Perdesaan Di Indonesia Tahun 2019 – 2023*. 32(1), 45–60.
- Yoertiara, R. F. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan Provinsi-Provinsi Di Pulau Jawa. 2003, 8.5.2017, 7787–2005. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>